

BAB IV

STRATEGI POLITIK PKI DI BLITAR SELATAN

A. Hubungan Diplomatik dengan Negara-negara Komunis

Sebagai partai politik yang memiliki jaringan internasional, perdebatan mengenai Partai Komunis Indonesia tidaklah mudah untuk dilepaskan dari penalaran dunia waktu itu (oleh aksi perang dingin) dan juga situasi percaturan politik nasional. Bermula dari situasi internasional, Perang Dingin atau Perang Dunia III¹ adalah bentuk dari perang urat syaraf yang diawali oleh dua negara adidaya (Amerika Serikat dan Uni Soviet) sejak paska Perang Dunia ke-2 hingga tumbanganya Uni Soviet. *Psy-war* yang sangat lama antara dua kekuatan dunia tersebut bertarung untuk memperebutkan dukungan publik terhadap masing-masing ideologi yang mereka anut. Tetapi mengapa harus dengan perang untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, sebab yang namanya perang tetaplh perang yang tidak kurang-kurangnya memakan korban ketimbang perang panas. Lagi pula dia berlangsung seakan permanen tanpa batas waktu, yang ujung-ujungnya negara lemah dan rakyat jelatalah yang menjadi *tumbal*-nya. Bagaimana tidak, ternyata justru perang ini lebih kejam dari yang dibayangkan. Perang ini dapat menghasilkan ribuan bahkan jutaan korban jiwa tanpa

¹ Mantan Direktur CIA (*Central Intelligence Agency*) James Woolsey dalam pidatonya di hadapan sejumlah Mahasiswa, pernah mengatakan bahwa Perang Dingin sebagai Perang Dunia III yang merupakan Perang Dunia paling lama di antara Perang Dunia I dan II, yaitu berlangsung selama empat dekade penuh (atau 40 tahun penuh). Lihat *Jawa Pos* Jum'at Kliwon, 04-04-2003, hlm. 1.

diketahui siapa otak pelakunya, bahkan pelakunya tidak perlu turun ke lapangan untuk menghasilkan mayat-mayat bergelimpangan. Tetapi bagaimana mungkin ini dapat terjadi, karena suatu *Psy war* atau *cold war* atau perang urat syaraf (PUS) tentu mensyaratkan adanya data-data intelegen yang cerdas sekaligus licik. Cerdik untuk mengetahui rahasia-rahasia kekuatan musuh dan licik untuk dapat menumbangkan kekuatan musuh dengan menghalalkan segala cara dan dengan mengkacaukan serta memutarbalik data-data rahasia tersebut meski seringkali harus melalui kontak senjata, sehingga tidak jarang bisa memunculkan fenomena sosial seperti: “maling teriak maling” atau “lempar batu sembunyi tangan”. Dan kebanyakan dari korban operasi intelegen yang dilakukan kedua negara adidaya adalah negara lemah yang kebetulan memihak salah satu di antaranya, seperti contohnya Cuba, Vietnam Utara dan Selatan, Viet Cong, RRC, Turki, sebagian negara Afrika, Czechoslovakia, Cambodia, dan masih banyak lagi termasuk di sini yaitu Indonesia di tahun 1965.

Indonesia di era 1960-an termasuk negara yang tidak disukai oleh blok Barat pimpinan Amerika Serikat (AS). Di era *cold war* itu konflik utama terjadi antara blok kapitalis (dipimpin AS) dengan blok komunis (RRC dan Uni Soviet). Saat itu AS sedang bersiap-siap mengirim ratusan ribu pasukan untuk menghabisi komunis di Korea Utara. Sementara itu di Indonesia Partai Komunisnya (PKI) merupakan partai legal. Saat kebencian AS terhadap Indonesia memuncak dengan menghentikan bantuan, Presiden Soekarno menyambutnya dengan pernyataan keras: “*Go to hell with your aid!*”. Sebagai pemimpin negara yang relatif baru lahir, Soekarno dianggap

berani, apalagi dengan adanya kebijakan untuk rakyatnya: "Berdiri pada kaki sendiri".²

Akibatnya, sikap AS menjadi jelas: Gulingkan Presiden Soekarno. Sikap AS ini didukung oleh komplotannya, Inggris dan Australia. Sejak AS menghentikan bantuannya, mereka justru membangun hubungan dengan faksi-faksi militer Indonesia. Mereka melengkapi dan melatih para perwira dan pasukan Indonesia. Melalui operasi Intelijen yang dimotori oleh CIA, mereka menggelitik militer untuk merongrong Bung Karno.³ Untuk itu CIA (sebagai alat intelejen AS) membantu usaha *Coup d'etat*⁴ tersebut dengan berbagai cara termasuk pengucuran dana dan segala usaha untuk menghancurkan PKI. Dalam beberapa dokumen CIA terungkap bahwa bantuan yang diberikan pihak AS sebanyak Rp. 50 juta kepada KAP (Komite Aksi Pengganyangan) Gestapu melalui perantara Adam Malik, sedangkan pimpinan umum KAP Gestapu dipegang oleh Subechan Z.E. dari NU dan Harry Tjan Silalahi (dari Katholik).⁵

² Soebandrio, *Kesaksianku Tentang G30S*, (Jakarta: tidak diterbitkan, t.t.), hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴ *Coup d'etat* artinya perebutan kekuasaan pemerintahan dengan sekonyong-konyong sekali dan dengan paksaan. Lihat Pringgodigdo (red.), *Ensiklopedia Umum*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, t.t.), hlm. 63.

⁵ Pudji Rahardjo, *Arus Balik Kisah G30S'65: Bendera Merah Putih Disalahgunakan untuk Melakukan Pembunuhan yang tidak Berasaskan Hukum dan Keadilan*, (Surabaya: Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 1965 (LPKP 1965), Pengurus Daerah Jatim, 2002), hlm. 196.

Hal senada juga diucapkan oleh David T. Johnson (1976), yaitu bahwa ada enam skenario yang dapat dijalankan AS dalam menghadapi situasi yang memanas di Indonesia menjelang tahun 1965⁶:

1. Membiarkan saja
2. Membujuk Soekarno mengubah kebijakan
3. Menyingkirkan Soekarno
4. Merongrong AD mengambil alih kekuasaan
5. Merusak kekuatan PKI
6. Merekayasa kehancuran PKI sekaligus kejatuhan Soekarno

Ternyata skenario terakhir yang dianggap paling menguntungkan dan tepat untuk dilaksanakan.

Ternyata permasalahan tidak berhenti sampai di sini, permasalahan tidak berhenti dari usaha intelejen dan pembunuhan-pembunuhan misterius. Fase inilah sebenarnya kolonialisme dengan wajah barunya muncul kembali, yaitu dengan nama Imperialisme. Diakui atau tidak, sebenarnya kedua negara (Soviet - Amerika) melakukan tindakan-tindakan imperialis, meskipun di tengah-tengah perjalanan argumentasi tersebut dibantah oleh Soviet. Soviet tetap bersikukuh bahwa tindakannya merupakan usaha untuk mewujudkan suasana adil dan makmur warga dunia berdasarkan ideologi komunis-sosialis tanpa imperialisme dan eksploitasi manusia oleh manusia. Dan Soviet sangat menekankan bahwa sosialis sangatlah

⁶ *Ibid.*

bertentangan dengan imperialis.⁷ Namun pernyataan Soviet tersebut tidak dapat diterima begitu saja oleh RRC, sebagai negara komunis kedua yang paling fanatik setelah Soviet. RRC tetap pada pendiriannya yakni mengakui bahwa Soviet masih belum dapat menerapkan konsep Marxisme-Leninisme secara murni dan konsekuen, serta dinyatakan pula bahwa Soviet telah melenceng dari tujuan komunis-sosialis melainkan cenderung kepada praktek-praktek imperialis.⁸

Bermula dari interpretasi yang beda antara Soviet dan RRC inilah, sehingga partai komunis sedunia pada awal tahun 1960-an mengalami perpecahan. Sedangkan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada waktu itu mulai banting setir mengarahkan kiblat komunisnya kepada RRC yang dipimpin oleh Mao Ze Dong. Bersamaan dengan itu, Indonesia sendiri pernah ada masalah dengan PBB yaitu tindakan keluar (*boikot*) Soekarno dari keanggotaan PBB yang sangat mengejutkan perhatian masyarakat dunia. Hal ini dapat terjadi karena tindakan Soekarno tersebut tidak dapat dilepaskan dari partai empat besar di negeri ini pada waktu itu, terutama PKI, yang dapat dikatakan sejalan dengan pemikirannya yaitu gabungan antara marhein, marxisme, dan nasionalisme. Indikasi tersebut juga terlihat ketika Soekarno melepaskan diri dari dominasi Barat, dan seketika itu juga Soekarno membentuk jalur

⁷ The Letter of The Central Committee of The Communist Party of China on June 14, 1963, in reply to the Letter of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union of March 30, 1963., *A Proposal Concerning the General Line of the International Communist Movement*, (Peking: Foreign Languages Press, 1963), hlm. 4.

⁸ Wang Ming, *China: Cultural Revolution or Counter Revolution Coup?*, (Moscow: Novosti Press, 1969), hlm. 57.

khusus antara Jakarta-Peking sehingga dapat kita maklumi adanya kerjasama senjata antar dua negara ini, seperti senjata Cung dan AK-47 dari RRC.⁹

B. Jaringan PKI di Pentas Politik Nasional

Sehubungan dengan situasi perpolitikan dunia yang semakin panas meski dengan cara Perang Dingin, di masa Demokrasi Terpimpin muncul sebuah pernyataan keras dari Bung Karno yang mampu membakar semangat revolusi, membakar keberanian, dan menanamkan kecerdasan sosial rakyatnya yakni: “dalam Demokrasi Terpimpin harus dilakukan *retooling en herordering, think and rethink, make and remake, serta shape and reshape*. Buanglah apa yang salah, bentuklah apa yang perlu, beranilah membuang apa yang harus dibuang, beranilah membongkar segala alat-alat yang tidak tepat untuk meneruskan perjuangan di atas rel revolusi, dan beranilah mengadakan *retooling for the future...*”.¹⁰

Rumusan yang demikian itulah kemudian menghasilkan interpretasi yang lebih keras dan radikal oleh pihak PKI. Sebagai partai empat besar pada pemilu 1955¹¹ dan memiliki kedekatan emosional dengan Soekarno, PKI berani menerapkan sikap *ganyang* terhadap semua lawan politiknya, sebagaimana sikap *ganyang*

⁹ Mahmillub, “kasus Omar Dani”, hlm. 017-018., dalam Hermawan Sulistyono, *Palu Arit di Ladang Tebu : Sejarah Pembantaian Massal Yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966)*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), hlm. 28.

¹⁰ Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai : G30S/PKI dan Peran Bung Karno*, (Jakarta: Sri Murni, 1988), hlm. 109.

¹¹ Lihat lampiran 10 dalam riset ini.

Soekarno terhadap Malaysia. Respon interpretasi PKI inilah yang merupakan bukti dari adanya kedekatan emosional bagai seorang ayah (Soekarno) dengan anaknya (PKI). Hal ini tetap saja terjadi meskipun Soekarno sendiri pernah melahirkan sebuah konsep pemersatu bangsa, yaitu NASAKOM. Namun hakekat dari Nasakom tersebut tetap terdengar memaksa di telinga kita, bagaimana tidak, meskipun konsepnya mencoba mempersatukan tiga ideologi besar yaitu Nasionalis, Agama, dan Komunis, tetapi ujung-ujungnya tetap saja ada keberpihakan dari Soekarno sendiri. Keberpihakan pemikiran revolusionernya Soekarno dengan PKI mulai terlihat jelas ketika beliau melakukan pidato kenegaraan di tahun 1958 yang beliau nyatakan sebagai "tahun tantangan". Pernyataan beliau tersebut seperti:

"Aku cinta kepada kaum nasionalis, tetapi nasionalis yang revolusioner. Aku cinta kepada kaum agama, tetapi kaum agama yang revolusioner. Dan Aku cinta kepada kaum komunis, karena kaum komunis adalah revolusioner".¹²

Demikian pernyataan beliau, sehingga dapat ditafsirkan bahwa diantara ketiga ideologi besar yang dirangkumnya dalam Nasakom tersebut, komunislah yang paling revolusioner, yang lainnya tidak.

Sehubungan dengan semangat revolusioner tersebut, Bung Karno pernah berkata bahwa negeri adikuasa (terutama Amerika Serikat bersama negeri Barat pendukungnya) dengan terbuka dan secara licik mengaduk-aduk negara orang lain

¹² Soegiarso Soerojo, *op. cit.*, hlm. 110.

dengan sasaran utama negara-negara Dunia Ketiga.¹³ Khususnya Indonesia, Soekarno dianggap Amerika Serikat menghambat garis politik “dunia bebas”. Dengan gemilang manuver Amerika Serikat itu berhasil, maka berguguranlah satu demi satu, Patrice Lumumba, Modibo Meita, Kwame Nkrumah, Norodom Sihanouk (berhasil tampil kembali) dan Soekarno sendiri. Mereka semua merupakan bahaya paling potensial dari deretan pemimpin Dunia Ketiga bagi “dunia bebas”, khususnya Amerika Serikat yang sedang terlibat perang Vietnam yang tak dapat ditaklukkan.¹⁴

Atas dasar itu, Soekarno menamai abad XX adalah “abad intervensi”. Abad intervensi tersebut juga merupakan abad puncak kecanggihan *intelligence* yang sangat berkuasa di seluruh dunia. Kegiatan *intelligence* ini memang menjadi bagian sangat penting bagi pihak Sekutu berikut Uni Soviet untuk memenangkan Perang Dunia II dalam menaklukkan kubu fasisme. Namun setelah Perang Dunia selesai, langsung serta merta pecah “Perang Dingin” yaitu perang tanpa senjata dan tanpa ledakan bom atom. Tetapi perang Dingin tetaplah perang yang tidak kurang parah dan tidak kurang-kurangnya memakan korban ketimbang perang panas. Lagi pula ia berlangsung seakan permanen tanpa batas waktu. Bedanya adalah dalam pengelompokan perseteruan dan persekutuannya sudah terjadi pergeseran, bukan lagi kekuatan demokrasi melawan fasisme, tetapi kubu kapitalis berhadapan dengan kubu komunis. Kedua pihak (terbuka atau tertutup, bersih atau kotor) menghalalkan

¹³ Dunia Ketiga adalah sebutan untuk negara-negara yang sedang membangun atau negara berkembang, seperti Indonesia dan negara-negara sebagian besar di Asia dan Afrika.

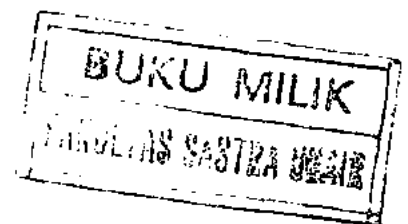
¹⁴ Edward C. Keefe (ed.), *Dokumen CIA: Melacak Penggulingan Soekarno dan Konspirasi G30S 1965*, edisi Indonesia, (Jakarta: Hasta Mitra, 2002), hlm. vi.

segala cara guna membendung dan kalau perlu membekuk batang leher lawan masing-masing. Oleh karena itu, Indonesia dan segenap rakyatnya dapat banyak bercerita tentang hal itu. Hal ini dikarenakan Indonesia paling tahu dan paling merasakan hasil produk-produk Perang Dingin sejak Proklamasi Kemerdekaannya (1945) sampai kemudian memuncak di tahun 1965.¹⁵

Dengan demikian Soekarno berusaha meyakinkan rakyat-rakyatnya, bahwa hingga di tahun 1960-an bangsa Indonesia harus mulai menegakkan azas “berdiri di atas kaki sendiri” di bidang pangan, bahkan rencananya waktu itu secepat-cepatnya tidak lagi mengimport beras. Ini bukannya tidak ada konsekuensinya, di antaranya yaitu peningkatan produksi pangan. Berdasarkan musyawarah dengan berbagai pemimpin organisasi tani, beliau berkesimpulan bahwa jika UUPA dan UUPBH dilaksanakan maka terciptalah syarat-syarat yang diperlukan untuk peningkatan produksi pangan itu. Sehubungan dengan itu, negara tidak merampas milik tanah siapapun, sejangkal pun tidak ada yang dirampas berdasarkan UUPA, melainkan semuanya dibayar. Masyarakat jangan sampai keliru menafsirkan makna dari landreform tahun 1960, penerapan UUPA dan UUPBH bukan dalam rangka mempersempit kepemilikan tanah, melainkan landreform berarti memperkuat dan memperluas kepemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia terutama kaum tani.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 632-633.



Pernyataan Soekarno tersebut memperlihatkan kepada kita akan adanya keresahan agraria dan mobilisasi petani di pedesaan Jawa pada tahun 1960-an awal. Di mana Sartono sendiri pernah menganalisa bahwa hubungan struktural agraria yang ada waktu itu mampu memberikan gambaran bahwa landreform pada dasarnya merupakan masalah kekuasaan politik juga. Adapun alasannya yaitu di balik keberhasilan landreform oleh PKI, ternyata membuahkan sebuah konflik yang diawali dari konflik horizontal, seperti konflik antara petani dengan tuan tanah yang feodal (termasuk kaum agama yang menguasai banyak tanah). Hingga meningkat pada konflik yang vertikal yaitu antara petani yang digerakkan oleh PKI dengan alat-alat kekuasaan negara (ABRI), sebagaimana kasus Blitar Selatan.¹⁷

Sedangkan maksud Republik Indonesia *as a matter of principle* berkonfrontasi terhadap Malaysia yaitu Soekarno tidak ingin kaum-kaum imperialis menggerogoti persatuan Indonesia dengan cara menguasai negara-negara tetangga Indonesia lalu dijadikan negara boneka oleh kaum imperialis. Soekarno sangat khawatir kalau kasus Malaysia ini merupakan pengulangan dari peristiwa Irian Barat. Sebab jika negara-negara sekeliling Indonesia dikuasai oleh kaum imperialis (meski hanya negara boneka) maka besar kemungkinan persatuan Indonesia mudah terkikis, seperti kasus Irian Barat yang akhirnya berhasil dibebaskan dari tangan-tangan kolonialis dan imperialis. Jika Malaysia sudah berada di tangan imperialis Inggris,

¹⁷ Lihat konsep keresahan agrariannya Sartono di bab satu halaman 22-23 dalam riset ini; serta lihat pula Politbiro CC PKI, *Tegakkan PKI Jang Marxis-Leninis untuk Memimpin Revolusi Demokrasi Rakjat Indonesia: Lima Dokumen Penting Politbiro CC PKI*, (Djawa Tengah: Delegasi CC PKI, 1971), hlm. 66., yang menjelaskan hubungan yang tidak harmonis antara ABRI dengan petani pada masa Suharto-Nasution.

maka daerah pertama kali yang harus terkikis dan waktu itu sudah terasa gejala-gejalanya yaitu Kalimantan Utara.¹⁸

C. Kekuatan PKI di Blitar Selatan

1. Pra-Gestapu

Sejak pemilu pertama di Indonesia tahun 1955, PKI sudah menguasai Blitar Selatan. Selanjutnya di tahun 1959, Blitar Selatan sudah mulai dikuasai oleh dua partai besar yaitu PKI dan NU. NU mayoritas berada di daerah sekitar Dawuhan, sedangkan semakin ke selatan (Surahwadang hingga Sumberejo ke selatan) didominasi oleh PKI, dan PNI ada tapi diperkirakan hanya 5 % pada waktu itu. Masih di tahun 1959, kehidupan masyarakat Blitar Selatan semakin memperlihatkan kekacauannya yaitu dengan menjamurnya perjudian, kriminalitas, pencurian, dan lain-lain. Kenyataannya semua aktivitas yang dilakukan oleh warga tersebut dapat dikatakan atas sepengetahuan PKI, sebab hampir semua aparat pemerintahan desa waktu itu di-PKI-kan (tidak berbeda dengan orde baru dengan istilah "kuningisasi" bagi pegawai negeri), termasuk camat-camatnya hingga sampai lurah-lurahnyanya. Namun demikian, bukti-bukti yang mengatakan bahwa ini semua adalah didalangi PKI tidak ada, karena dari beberapa pelaku tindak kriminal tidak semuanya mengaku berasal dari unsur PKI atau Pemuda Rakyat.¹⁹

¹⁸ Edwad C. Keefler (ed.), *op. cit.*, hlm. 635-637.

Kurangnya penyuluhan dan perhatian dari pemerintah hingga di awal tahun 1960-an mengakibatkan perampokan-perampokan dan kekacauan-kekacauan lebih gencar dibandingkan tahun 1950-an. Karena kurang adanya bantuan dari pemerintah dan pendekatan dari aparat negara, maka hak asasi manusia sering kali kurang terlindungi. Sasaran tindak kriminalitas adalah orang-orang kaya yang masih didekati atau dijadikan sandaran (terutama masalah finansial) oleh tokoh-tokoh politik maupun agama yang masih kuat. Sedangkan bagi musuh yang digembar-gemborkan oleh PKI seperti tujuh setan desa khususnya tuan tanah, sama sekali tidak ada di Blitar Selatan. Yang ada hanyalah rentenir (yang menganakkan uang). Karena tidak adanya tuan tanah, maka semua tanah digarap sendiri-sendiri. Istilahnya waktu itu "*sugih mlarat, mangan podo*" atau "miskin-kaya, makanannya sama" sehingga tidak ada istilah ketidak-adilan penerapan UUPA 1960 seperti yang ditakutkan PKI waktu itu, yang ada justru penerapan UUPA dan UUPBH secara murni dan konsekuen karena tanah yang dimiliki oleh warga cukup luas. Bahkan telah ada aktivitas membagi tanah bagi warga yang tanahnya berlebih. Namun sayangnya tanahnya tidak dapat ditanami apa-apa selain ketela pohon dan jagung. Jadi dari sinilah, dari alam Blitar Selatan inilah, sebenarnya sudah dapat memberikan pelajaran bagi manusia bahwa "apa bisa konsep sama rata, sama rasa diterapkan? jelas tidak bisa jawabnya", karena alam

¹⁹ Wawancara dengan Poni Purnomo (62) di Tumpakoyot, mantan Guru SD di Suruhwadang dan pernah menjadi anggota PUSKOPAD Brawijaya, pada hari Kamis, tanggal 13-02-2003, pukul 16.00-17.30 WIB; dan dengan Suyitno (53) di Plandirejo.

di sini tidak rata dan tidak sama, di satu daerah tanahnya berbatu, di daerah lain tanahnya gembur, dan sebagainya.²⁰

Selain musuh-musuh tersebut, PKI Blitar Selatan juga memusuhi kaum agama dan sesembahan kepercayaan atau *sesajen*. Jadi ajaran PKI di Blitar Selatan waktu itu boleh dikatakan *atheis* (anti agama), tidak dibolehkannya selamatan dan membakar kemenyan bagi penduduk Blitar Selatan. Bahkan ada nyanyian yang mengisahkan bahwa keindahan alam di sekeliling manusia adalah ciptaan alam itu sendiri, bukan ciptaan Tuhan, contohnya nyanyian Telaga Sarangan.²¹

Pada tataran filosofis dan teoritis, PKI berusaha membumikan ajaran marxisme dan komunisme. Di bawah praksis MKTBP²² (Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan) terdapat “bahasa komunisme” yang dilokalkan. Daripada menggunakan cara produksi (*mode of production*) kapitalis untuk menjelaskan kesengsaraan rakyat, PKI memilih menggunakan suatu konsep yang lebih sederhana mengenai tiga sebab kesengsaraan rakyat²³:

²⁰ Poni Purnomo, wawancara.

²¹ Poni Purnomo, wawancara.

²² MKTBP yaitu 1) perjuangan gerilya di desa (yang terdiri dari buruh tani dan tani miskin), 2) aksi-aksi revolusioner oleh kaum buruh (terutama buruh transportasi) di kota-kota, dan 3) pekerjaan intensif di kalangan kekuatan bersenjata musuh (dapat diartikan kalangan ABRI). Lihat D.N. Aidit, “Kibarkan Tinggi-tinggi Pandji Revolusi”, (t.kota: t.penerbit, t.t.) dalam Politbiro CC PKI, *op. cit.*, hlm. 122-123.

²³ Sudisman, “Analysis of Responsibility: Defense speech of General Secretary of the Indonesia Communist Party at his Trial before the Special Military Tribunal, (Jakarta: 21 July 1967)”, yang telah diterjemahkan oleh B.R.O.G. Anderson., dalam Hermawan Sulistyono, *op. cit.*, halaman 39.; Lihat juga teori Kesengsaraannya – Marx di bab satu, hlm. 18 dalam riset ini. Berdasarkan teori tersebut, besar kemungkinan upaya PKI tersebut mencoba mencocokkan dengan kondisi di Eropa di masa Marx, yaitu bahwa lama-kelamaan kaum pengusaha (borjuis) pasti menggunakan mesin-mesin

1. Para imperialis, terutama Amerika, merupakan musuh utama rakyat progresif di seluruh dunia.
2. Di desa-desa terdapat tujuh setan, yaitu (1) setan tuan tanah yang menolak melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH); (2) setan pejabat yang membela kepentingan setan tuan tanah; (3) setan tengkulak yang memeras petani; (4) kapitalis birokrat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri dengan cara mengeksploitasi petani; (5) bandit desa yang menjadi antek dan kaki tangan tuan tanah; (6) rentenir; (7) penghisap darah rakyat yang menjebak petani menjadi penghutang seumur hidup (pengijon).
3. Di kota-kota ada tiga setan kota, baik sipil maupun militer, yaitu: (1) kaum kapitalis birokrat; (2) para penggelap; (3) pejabat korup.

Pada 1960, pemerintah mensahkan berlakunya UUPA. Sebagai partai yang mendasarkan kekuatannya pada kaum tani, PKI paling diuntungkan dengan UU ini. Oleh karena itu, PKI tidak sabar melihat pelaksanaan UU yang berjalan lambat ini. Pemerintah menghabiskan satu tahun untuk mempersiapkan pelaksanaannya, dan lebih dari itu, pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk menjalankan program tersebut.²⁴ Bersamaan dengan UU ini, diberlakukan pula Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) yang mengatur soal pembagian hasil

untuk memaksimalkan produksinya dalam perusahaan yang mengakibatkan banyak kaum buruh menjadi pengangguran.

²⁴ *Harian Rakyat*, 01-12-1960., dalam Hernawan Sulisty, *ibid.*, hlm. 143.

panen antara pemilik tanah dan petani penggarap. Kedua UU ini merupakan keberhasilan PKI dalam politik nasional, meskipun penerapannya di tingkat daerah banyak yang kacau.²⁵

Keberhasilan ini kemudian dilanjutkan dengan Plan 4 tahunan dari hasil Kongres Luar Biasa PKI tahun 1962, yang terdiri dari: gerak awalan (dengan konsentrasi pada organisasi dan pendidikan) yang dimulai pada tanggal 17 Agustus 1963 s/d Desember 1963, gerak pelaksana (dengan konsentrasi tetap: pendidikan dan organisasi) dimulai pada Januari 1964 s/d Desember 1966, dan gerak akhir (konsentrasi kepada kebudayaan, ideologi, dan organisasi) yang dimulai pada tanggal 1 Januari 1967 s/d Desember 1967.²⁶

Salah satu alasan meningkatnya konfrontasi dan konflik disertai kekerasan adalah kebijakan revolusioner PKI.²⁷ Meskipun “suasana revolusioner” dikembangkan oleh setiap partai politik dan organisasi massa selama era Demokrasi Terpimpin, tetapi semuanya kecuali PKI, menyebut kekuatan asing sebagai target mereka. PKI lebih jelas merumuskan musuh-musuh dalam

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Lihat *Duta Masyarakat*, 01-07-1967; dan lihat juga Politbiro CC PKI, *op. cit.*, hlm. 174-175.

²⁷ *Berita Antara*, 30-06-1967. Di mana pada tahun tersebut, Pangdam V Jaya Mayjen Amir Mahmud menemukan dokumen berhuruf Cina yang telah diberikan kepada PKI dengan judul: “Tahun 1967”. Isinya: “Untuk memecah belah dan mengkacaukan segala bidang kehidupan, yakni serangan balasan untuk *come back*-nya PKI. Setelah segala rencana strateginya itu terlaksana barulah mereka hendak melakukan *counter offensive come back* PKI dan Orla, yang kesemuanya ingin mereka capai dengan jalan melenyapkan harapan serta kepercayaan rakyat terhadap apa yang mereka sebut klik Soeharto-Nasution.

negerinya, seperti tujuh setan desa. Karena itulah, berbagai kampanye aksi revolusioner diterjemahkan sebagai peningkatan keberanian untuk merampas tanah, melakukan tindak kekerasan, serta kesiapan untuk berkelahi secara fisik. Ini sejalan dengan tema kampanye nasional PKI selama tahun 1963.²⁸

Tema keberanian dalam konteks yang lebih luas, tetapi berkaitan dengan pengambil-alihan tanah, disampaikan dalam laporan politik Ketua PKI Aidit di depan Sidang Pleno CC PKI pada Februari 1963 dengan judul "Berani! Berani! Sekali Lagi Berani!". Judul pidato ini digunakan dalam berbagai rapat umum yang diadakan setelah sidang pleno tersebut. Judul dengan huruf berukuran sangat besar ditulis di layar panggung pada peringatan HUT PKI ke-53.²⁹

Namun, PKI di Blitar Selatan dengan leluasa menyebarkan ajaran-ajarannya, mengadakan kursus-kursus politik dengan ajaran Marxisme-Leninisme dan ajaran Materialisme-Dialektika-Historis (M.D.H.)³⁰. Cara pengajarannya tidak dilakukan di gedung-gedung atau di rumah-rumah, melainkan di ladang-ladang sambil bekerja. Jadi secara sosial-budaya, gerakan PKI tersebut sangat halus. Atas dasar itu, sebagian informan sempat bersaksi bahwa PKI sendiri waktu itu memiliki gerakan atau aktivitas yang terkadang membuat masyarakat simpatik,

²⁸ Bintang Merah, terbitan resmi PKI, edisi ke-20 dan edisi tahun baru tahun 1964., dalam Hermawan Sulisty, *op. cit.*, hlm. 143.

²⁹ Harian Rakjat, 11-02-1963 dan 23-05-1963, dalam *ibid.*

³⁰ Berdasarkan AD/ART PKI terbaru (tahun 1964) Bab Keanggotaan pasal 6 menyebutkan bahwa ajaran Marxisme-Leninis merupakan ajaran wajib bagi anggota PKI, tidak diperuntukkan bagi masyarakat umum. Jadi bagi masyarakat Blitar Selatan hal ini adalah pengecualian. Lihat AD-ART

tetapi terkadang juga meresahkan masyarakat. Contoh tindakan atau aktivitas PKI yang meresahkan masyarakat Blitar Selatan antara lain orang-orang yang mampu dan memiliki cukup bahan pangan diminta oleh PKI, jika tidak diserahkan malamnya akan dicuri bahkan pemiliknya ada yang dibunuh juga. PKI juga mengadakan penculikan dan perampokan ke luar daerah Blitar Selatan, seperti perampokan sapi dan barang-barang berharga lainnya sebagai persiapan untuk perang, dalam arti bertahan melawan desakan ABRI. Di lain pihak, masyarakat yang kurang berpendidikan, mudah diatur, muda-muda, dan kuat-kuat secara fisik diajari dan dilatih teknik-teknik berperang yaitu mulai dari cara melempar pisau (*sawatan glati*) hingga ajaran-ajaran pencak silat atau bela diri, jika tidak bersedia belajar akan dibunuh. Sedangkan bagi masyarakat yang mengaku sebagai aktivis partai politik pada hakekatnya mereka tidak tahu apa-apa. Di lain sisi PKI juga anti Tuhan, ini yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat setempat dan secara tidak langsung juga meresahkan masyarakat. Dukun-dukun dan orang-orang yang menyebarkan agama (kyai) diculik, juga upacara pemandian gong (mbah pradah) tidak diperbolehkan waktu itu. Meski demikian, masyarakat tetap melakukannya dengan sembunyi-sembunyi.³¹ Hal ini membuktikan bahwa Blitar Selatan sebelum peristiwa G30S benar-benar dipersiapkan sebagai tempat penyusunan kekuatan yang ditujukan kepada ABRI selaku saingan utama PKI di tingkat nasional.

(*Konstitusi*) PKI, (buku saku)., (Jakarta: CC-PKI, Kongres Luar Biasa tahun 1962), hlm. 34.; Lihat juga lampiran 5 dalam riset ini.

³¹ Mukadji, wawancara.

Dalam bidang pendidikan, jika kita mengamati penyelesaian-penyelesai masalah yang diambil khususnya di tingkat pemerintahan daerah, disimpulkan bahwa bangsa Indonesia waktu itu menghadapi permasalahan yang serius dengan sumber daya manusia (SDM). Jadi pemimpin-pemimpin RI di tingkat daerah waktu itu banyak yang tidak menguasai perpolitikan, apalagi ketatanegaraan, yang kehidupan masyarakat Blitar Selatan waktu itu lebih banyak diatur oleh budaya atau adat istiadat. Bahkan, waktu itu banyak masyarakat yang tidak lulus SR (Sekolah Rakyat), sedangkan gurunya hanya tamatan SR kelas tiga. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga guru sejak waktu tahun sebelum 1955. Selanjutnya di tahun 1959 sampai 1963 di daerah Blitar selatan, doktrin-doktrin partai komunis Indonesia semakin gencar. Indoktrinasi tersebut dilakukan baik terhadap rakyat jelata, pegawai negeri (yang banyak dari guru), dan juga kepada ormas-ormas dari organisasi pemuda. Masyarakat waktu itu dengan mudah dipengaruhi dan dihasut hanya karena kelemahannya baik secara ekonomi maupun SDM-nya. Dengan demikian, indoktrinasi yang dilakukan terhadap rakyat sama artinya dengan pembodohan. Masyarakat pun tidak ada yang pintar sama sekali waktu itu.³²

Awal tahun 1960-an, khususnya tahun 1962-1963, jalur komunikasi warga Blitar selatan semakin baik, yaitu terbukti dengan masuknya koran Harian Rakyat (HR) milik PKI. HR waktu itu dapat dikatakan menguasai hampir seluruh daerah selatan bagi yang dapat membaca. Namun dampak dari perkembangan komunikasi

³² Poni Purnomo, wawancara.

terhadap pendidikan di tahun 1963 sangat memprihatinkan, sebab dengan lancarnya komunikasi justru membuat keprofesian guru terpecah menjadi dua yaitu guru NV (non vak) dan guru vak sentral, di mana guru NV dipimpin oleh golongan PKI. Hingga perpecahan tersebut merembet dari sistem pengajaran kepada anak didik, hingga terjadi perbedaan cara mengajar yang mencolok antar guru yang berbeda haluan. Murid seakan juga terpecah, jika gurunya berhaluan kiri maka nyanyian yang digunakan adalah nyanyian PKI seperti nyanyian genjer-genjer. Juga ada yel-yel Nasakom, jika tidak mau mengumandangkan Nasakom berarti dianggap pengkhianat bangsa. Sedangkan dari bidang kesenian dan kebudayaan, PKI juga memberikan andilnya dalam bentuk Lembaga, yaitu Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra).³³

Dengan demikian, dari tahun 1959 hingga 1963 menjadi jelas bahwa doktrin partai komunis Indonesia (PKI) sudah mengakar di batin warga Blitar Selatan, baik rakyat jelata, guru, PNS-PNS, dan lain-lain. PKI di Blitar Selatan sudah berhasil membangun jaringan ormas-ormas sebagai anak partai, seperti BTI, Pemuda rakyat, Lekra, dan sebagainya. Namun masyarakat Blitar selatan tetap merasakan adanya paksaan-paksaan secara halus dalam mengikuti partai PKI tersebut, seperti pernyataan-pernyataan sebagai berikut: "kamu petani, maka kamu harus ikut BTI!; Kamu pemuda, maka kamu harus bergabung bersama Pemuda Rakyat". Jika kehidupan sosial masyarakat waktu itu tidak sehaluan dalam

³³ Poni Purnomo, wawancara.

ideologi atau tata hidup sehari-hari, termasuk tidak mau mengikuti partai, maka sanksinya akan dikucilkan.³⁴

2. Detik-detik Sekitar Gestapu

Setelah memasuki tahun 1965, aktivitas-aktivitas dan ajaran-ajaran PKI tetap didengung-dengungkan. Namun waktu itu Blitar Selatan masih dalam kondisi aman terkendali, meskipun di utara Blitar Selatan seperti Blitar Utara (Srengat, Kanigoro, dll), Kediri, dan Jombang terjadi pembantaian besar-besaran terhadap anggota PKI. Berdasarkan kepercayaan masyarakat sekitar waktu itu: “hal ini dikarenakan Anshor, yang waktu itu bertindak sebagai jagal, tidak berani masuk wilayah Blitar Selatan karena masyarakatnya kuat-kuat dan sakti-sakti. Ini terbukti ketika Sakera³⁵ akan membakar punden-punden atau sajen-sajen (*dayangan*) di Suruhwadang dan Lodoyo, tidak jadi melakukannya karena setiap perempatan di dua daerah tersebut (terutama Lodoyo) dijaga harimau siluman. Ada yang menyebut itu merupakan perwujudan dari mbah Pradah (sebutan dari Gong yang dikeramatkan dan setiap setahun sekali dimandikan).” Sehingga sakera

³⁴ Poni Purnomo, wawancara.; Doktrin tersebut memang sejalan dengan AD/ART PKI yang menyatakan bahwa bekerja di kalangan kaum buruh dan kaum tani adalah bentuk kegiatan partai yang terpenting dan pokok, sehingga anggota partai harus melakukannya secara terus menerus, sistemik, dan tidak jemu-jemu. Lihat “AD-ART (konstitusi) PKI, buku saku”, *op. cit.*, hlm. 19.

³⁵ Sakera adalah istilah yang dikenal masyarakat Blitar Selatan terhadap pasukan Anshor-NU.

tidak jadi merusak dan tidak berani meneruskan perjalanannya masuk ke pelosok Blitar Selatan.³⁶

Kesaktian masyarakat semakin terlihat nyata ketika sebagian besar masyarakat Blitar Selatan memiliki tiga *gaman* yang memang fungsinya khusus untuk menghindari gencarnya penculikan-penculikan yang dilakukan orang-orang Anshor atau Sakera. Meski belum ada kejelasan bahwa tiga jimat tersebut berasal dari orang-orang PKI, namun yang jelas jika dihubungkan dengan tiga kata jimat tersebut membentuk tiga huruf P.K.I. (*Pentong, Kendit, dan Iket*). Bentuk kesaktian masyarakat Blitar Selatan inilah yang kemudian didefinisikan oleh ABRI bahwa "orang yang mempunyai jimat tersebut, otomatis sama dengan PKI".³⁷

Kondisi di Blitar Selatan tersebut sangat kontras dengan situasi nasional waktu itu, di mana menjelang peristiwa G30S, ABRI dalam kondisi rapuh, keamanan nasional tidak terjamin, diperlemah oleh faksionalisme politik, juga tindak korupsi merajalela di tingkat birokrat, dan masih banyak lagi unsur-unsur pemecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa yang semakin memperkeruh keadaan. Belum lagi adanya hubungan luar negeri yang tidak harmonis dengan negara tetangga, terutama Malaysia. Padahal menurut pengertian tradisional, kebijakan luar negeri adalah cermin dari situasi politik di dalam negeri. Ketika

³⁶ Mukadji, wawancara.

³⁷ Tekat, wawancara.

semua kekuatan Angkatan Bersenjata dikerahkan untuk menjaga sepanjang perbatasan RI guna menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Dengan demikian, politik konfrontasi dapat ditafsirkan sebagai upaya sistematis dan keberhasilan PKI menyingkirkan kekuatan AD dari Jakarta dan Jawa Timur. Tanpa kehadiran pasukan yang paling kuat di Jakarta dan Jawa itu, PKI memiliki ruang manuver yang lebih besar. Dalam situasi ini, PKI meningkatkan tekanannya terhadap Soekarno untuk membentuk “angkatan kelima”, yaitu militerisasi di kalangan petani dan pemuda. Meskipun disokong oleh AU³⁸, gagasan ini tidak pernah terwujud karena AD menolak.

Selain itu, terlalu riskan bagi Soekarno untuk mewujudkan usulan tersebut sebagai kebijakan. Jadi, saat meletus peristiwa G30S, PKI sebenarnya sama sekali tidak memiliki aparat militer maupun paramiliter.³⁹ Ketika Peristiwa G30S meletus, yang kemudian terjadi adalah peristiwa hiruk-pikuk yang terlalu acak, rumit, dan *mbulet* untuk direkonstruksi secara berimbang. Korban berjatuhan di daerah-daerah di mana ketegangan politik sudah tinggi selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.⁴⁰

³⁸ Departemen Angkatan Udara RI, “Tinjauan Intelijen No. 008/65 Sekitar Nasakomisasi, Angkatan ke-V, dan Bentrokan-bentrokan Antar Golongan”, dokumen rahasia No. U/2035/17/2/Intel., merupakan lampiran dokumen kesaksian Omar Dani dalam sidang Mahmillub, yang mengungkapkan bahwa AU tidak hanya mendukung ide itu tetapi juga membantu rakyat yang berada di sekitar pangkalan-pangkalan AU untuk berlatih kemiliteran., dalam Hermawan Sulisty, *op. cit.*, hlm. 18.

³⁹ Hermawan Sulisty, *ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

Bersamaan dengan itu, AD dalam pengantar Terbitan Khususnya No.1 -- yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Penerangan Markas Besar AD --, sibuk untuk meyakinkan kepada rakyat bahwa Peristiwa G30S bukan merupakan konflik internal AD. Bahkan dalam hitungan hari atau mungkin hitungan jam, AD mampu membikin cerita sejarah resmi yang dijadikan sejarah tunggal periode 1965-1966. Upaya AD tersebut tidak lain merupakan tindakan politik sekaligus tindakan propaganda untuk menghancurkan kekuatan komunis dikemudian hari.⁴¹ Hal ini jelas semakin mengkacaukan suasana politik nasional yang sudah keruh.

Meskipun PKI belum dilarang di seluruh Indonesia, pelarangan ini Cuma soal formalitas saja. Para komandan AD telah mengambil prakarsa sendiri untuk melarang PKI di lebih dari separuh propinsi yang ada di Indonesia. Saat itu anggota PKI lebih bersifat bawah tanah dan sebagian besar tanpa pemimpin, kemungkinan mereka masih mampu melakukan sabotase secara terbatas. Namun AD tidak lagi takut terhadap pemberontakan PKI dengan kekuatan penuh. Sebab penganyangan terhadap PKI telah menimbulkan terjadinya penyeberangan besar-besaran dari partai ini. Selain itu pembantaian terhadap anggota PKI dan para simpatisannya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali masih berlanjut hingga tahun 1966.⁴²

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 63.

⁴² CIA Intelligence Memorandum, "The Changed Political Scene in Indonesia", 3 January 1966 # 88-119, Doc. #114., dalam *ibid.*, hlm. 196.

Ketika memasuki tahun 1966, situasi Blitar Selatan tiba-tiba berubah hingga menyerupai daerah-daerah lain di sekelilingnya (terutama Kediri dan Jombang) yang mana sejak tahun 1965 sudah mengalami peristiwa penganyangan terhadap anggota-anggota PKI. Berdasarkan laporan *The New York Times* menyatakan bahwa sejak saat itu (1965-1966) AD bersatu dengan gerombolan Muslim yang menyandang pisau panjang yang disebut Parang. Sementara itu sumber-sumber barat yang memiliki hubungan diplomatik dengan Jakarta menyatakan bahwa sebagian besar kaum komunis beserta simpatisannya yang tewas dijagal oleh geng-geng Muslim tersebut banyak disebabkan oleh dendam politik yang telah berlangsung bertahun-tahun di tengah meningkatnya pengaruh komunisme. Meski beberapa ribu kaum Merah meyakini bahwa hal ini merupakan aksi eksekusi secara diam-diam oleh AD. Sedangkan untuk kasus Jawa Timur, "perang suci" Muslim melawan kaum komunis telah berkobar sejak musim semi lalu di tahun 1965. Dengan semangat anti komunis, menyusul upaya kudeta yang gagal, pertumpahan darah meningkat serta menyebar ke daerah-daerah pelosok lainnya, termasuk Blitar Selatan.⁴³

Khusus Blitar Selatan, pembersihan unsur komunis dijadikan proyek besar bagi ABRI. Di tahun 1967, pemerintah mulai membuat kebijaksanaan bahwa setiap perangkat desa harus berasal dari ABRI (*Care Taker*). Setelah *Care Taker* (CT) terbentuk, pada akhir tahun 1967, masyarakat dikejutkan dengan terjadinya

⁴³ NYT, 16-01-1966., dalam *ibid.*, hlm. 197.

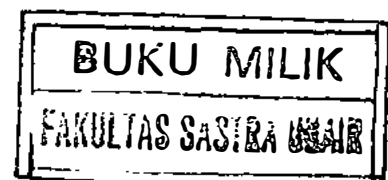
penculikan terhadap anggota-anggota CT oleh PKI malam. Yang mana datangnya PKI Malam tersebut ke Blitar Selatan tidak diketahui oleh masyarakat. Dengan adanya peristiwa penculikan dan perlawanan PKI terhadap pasukan ABRI khususnya yang terbesar di desa Kedung Banteng dan desa Lorejo (yang sekarang kedua desa tersebut menjadi bagian dari Kecamatan Bakung), maka ABRI menganggap bahwa ini merupakan tantangan perang dari pihak PKI. Atas dasar itu, kemudian ABRI -- yang diwakili oleh Mayjen M. Jasin selaku Pangdam VIII/Brawijaya -- mengusulkan kepada Bupati Blitar waktu itu (Sanusi) untuk membumihanguskan Blitar Selatan. Namun Bupati tidak dapat menerima usulan tersebut mengenai operasi bumi hangus, dengan alasan⁴⁴:

- 1) Masyarakat yang tidak tahu apa-apa termasuk anak-anak, wanita, orang tua, dan lain-lain.
- 2) Pemerintah butuh penduduk, kalau tidak ada penduduk tak perlu ada bupati.

Setelah ditimbang-timbang kemudian muncullah sebuah sintesis berupa operasi besar yang dinamakan Operasi Trisula. Dengan berpusat komando di desa Suruhwadang (sebagai posko), yang dimotori oleh batalyon 511 Blitar, di bawah pengawasan pemerintahan pusat yang ditugaskan sebagai tim intrograsi. Hingga dibentuklah tempat-tempat *screening* bagi masyarakat-masyarakat yang menyerah kepada ABRI.⁴⁵

⁴⁴ Mulyono, wawancara.

⁴⁵ Mulyono, wawancara.



Pembunuhan-pembunuhan massal terhadap kubu komunis tersebut secara implisit juga disahkan oleh Jenderal besar RI waktu itu yaitu Jenderal Nasution. Dapat ditafsirkan bahwa beliau pada tahun 1966 kurang lebih memerintahkan untuk membasmi kaum komunis hingga ke akar-akarnya, dan harus diambil tindakan terhadap siapa pun yang dicurigai terlibat langsung maupun tidak langsung dalam Gerakan 30 September.⁴⁶

3. Paska-Gestapu: Puncak Konflik Antara ABRI dan PKI

Untuk mengetrapkan taktik dan strategi Mao Ze Dong setelah gagal dalam G30S untuk merebut kekuasaan RI, maka sekarang PKI mempersiapkan desa sebagai basis dan kemudian mengepung kota.⁴⁷ Untuk ini mereka diam-diam menyusun PKI Gaya Baru dengan jalan membagi-bagi wilayah perjuangan mereka sebagai berikut⁴⁸:

CC (Comite Central)	= TK I	= Daerah Tingkat Pusat
CDB (Comite Daerah Besar)	= TK II	= Daerah Tingkat Propinsi
CS (Comite Seksi)	= TK III (Tiga)	= Daerah Tingkat Kabupaten

⁴⁶ Sudisman, "Analysis of Responsibility: Defense speech of General Secretary of the Indonesia Communist Party at his Trial before the Special Military Tribunal, (Jakarta: 21 July 1967)", yang telah diterjemahkan oleh B.R.O.G. Anderson., dalam Hermawan Sulisty, *op. cit.*, hlm. 42.

⁴⁷ Lihat teori "Perang Semesta antara Kota dan Desa" oleh Marshal Lin Piao di bab satu, hlm. 24 dalam riset ini.

⁴⁸ Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Brawijaya (IKABRA), *Cuplikan Sejarah Operasi Trisula KODAM VIII/Brawijaya di Blitar Selatan*, (Surabaya: IKABRA, 1996), hlm. 4.; Data ini juga di dukung oleh sumber-sumber CC-PKI fasal 25, "AD-ART (konstitusi) PKI, buku saku", *op. cit.*, hlm. 56-58., yang terlampir di halaman lampiran 5 dalam riset ini.

CSS (Comite Sub Seksi)	= TK IV (Tipat) = Daerah Tingkat Kecamatan
CRB (Comite Resort Besar)	= TK V (Tima) = Daerah Tingkat Kelurahan
CR (Comite Resort)	= TKVI(Tinem) = Daerah Tingkat Pendukuhan

Masih di tahun 1966-1967 dan setelah partai PKI ini dibubarkan oleh pemerintah, maka mereka benar-benar membuat politik ilegal atau bawah tanah⁴⁹ untuk mempertahankan keberadaannya. Mereka berusaha merongrong pemerintahan Soeharto dan membentuk KKM (Kerja di Kalangan Musuh). Adapun penerapan KKM ini antara lain dengan cara menyelundupkan kader-kadernya untuk menjadi camat dan lurah. Sedangkan cara politik yang diterapkan yaitu "tidak tahu pimpinan" dan 3 T (tidak mengerti, tidak mendengar, dan tidak tahu). Bersamaan dengan itu kader-kader beserta pentolan-pentolan PKI yang berasal dari Jakarta, masuk ke Blitar Selatan. Rakyat pun tidak tahu apa-apa, dan bahkan tidak berani untuk cari tahu. Ditambah lagi pentolan-pentolan PKI membuat markas-markas bawah tanah (ruba)⁵⁰, itupun masyarakat tahu tapi tidak berani bertanya untuk apa, sebab taruhannya adalah nyawa. PKI membuat Ruba (rumah bawah tanah), yang menurut peneliti tanah dari Vietnam, bahwa alam Blitar Selatan menyerupai persembunyian perang gerilya di Vietnam. Sehingga dibangunlah ruba-ruba yang di dalamnya terdapat ruang-ruang besar tempat PKI berlatih, belajar, dan bahkan mengikuti informasi radio dari RRC. Ini semua

⁴⁹ Adapun struktur organisasi politik bawah tanah PKI dapat dilihat di lampiran 6 dalam riset ini.

⁵⁰ Contoh-contoh gambar rumah bawah tanah (Ruba), baik yang alami maupun buatan, dapat dilihat dalam lampiran 7 dalam riset ini.

dilakukan untuk persiapan pemberontakan melawan ABRI, dan untuk menerapkan konsep Mao Ze Dong yaitu PKI jaya dari Desa Kepung Kota.⁵¹

Di samping itu PKI membentuk pangkalan-pangkalan operasi yang mereka sebut dengan nama Kompro (Komite Proyek) yang berjumlah delapan Kompro yaitu: Kompro Raung-Argopuro, Kompro Semeru Selatan, Kompro KKA (Kelud-Kawi-Arjuno), Kompro Gunung Kendeng, Kompro Lawu, Kompro Blitar Selatan, dan Kompro Benjeng. Di antara kompro-kompro ini, maka Kompro Blitar Selatanlah yang paling sempurna dan kuat. Pimpinan PKI membagi organisasi menjadi antara lain Pembangunan Partai (PP), Bagian Agitasi dan Propaganda (Bagirop), Gerakan Massa (Gemas), Kerja di Kalangan Musuh (KKM), Sabotase Combat (Sabcom), dan Perjuangan Bersenjata (Perjuta). Di samping itu mereka mendirikan sekolah-sekolah⁵² seperti SPR (Sekolah Perlawanan Rakyat), KKPR (Kursus Komando Perlawanan Rakyat), mereka juga membentuk kekuatan bersenjata dalam satuan-satuan Datasemen Gerilya (Detga), dan Gerakan Gerilya Desa atau Gerda (Gerda ini dibagi menjadi dua peleton, peleton pertama terdiri dari orang-orang luar Blitar Selatan, dan peleton kedua terdiri dari orang-orang Blitar Selatan)⁵³. Untuk mendukung gerakan-gerakan tersebut, PKI membentuk kader-

⁵¹ Mukadji, wawancara.

⁵² Adapun sekolah-sekolah PKI yang berada di sekitar Blitar Selatan dan Malang Selatan, mendapatkan pengajaran langsung dari tokoh-tokoh pentolan CC-PKI yang memang memiliki spesialisasi pelajaran sendiri-sendiri. Untuk itu nama-nama spesialisasi pengajaran, dosen, beserta siswa sekolahnya PKI terlampir dalam lampiran 8 dalam riset ini.

⁵³ Mukadji, wawancara.

kadernya yang bertugas menyembunyikan tokoh-tokoh PKI, menjadi kurir, petunjuk jalan, mencari informasi, serta memberikan laporan. Usaha-usaha PKI untuk mempengaruhi rakyat Blitar Selatan dilakukan secara bertahap yaitu mula-mula mempengaruhi untuk memihak PKI, kemudian berpaham komunis, dan akhirnya menjadi komunis.⁵⁴

Selain kondisi alam Blitar Selatan, kondisi sosial-ekonomi yang minus juga dapat dimanfaatkan oleh PKI. Bahkan pendekatan PKI terhadap masyarakat dapat sangat dekat, namun jeleknya dapat terjadi *bojomu bojoku* (istrimu istriku). Mungkin hal itu merupakan bentuk penyelewengan terhadap penerapan dari konsep keadilan dalam ideologi sosialis klasik, yakni "sama rata, sama rasa". Selebihnya dari itu, tahun 1964 juga dipercayai merupakan tahun persiapan propaganda mencari dukungan massa dalam pemilu berikutnya, yang ternyata selalu mengalami penundaan hingga tahun 1971, sehingga di Blitar Selatan janji-janji PKI sangat mendominasi, seperti "jika kamu besok milih PKI, maka harga-harga akan turun".⁵⁵

Usaha tersebut di atas ternyata membuahkan hasil di Blitar Selatan karena disebabkan oleh beberapa faktor⁵⁶:

- a) Daerah Blitar Selatan adalah daerah yang "terlupakan dari pembinaan unsur-unsur ORBA dan ABRI sehingga mereka dapat bergerak secara bebas".

⁵⁴ Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Brawijaya (IKABRA), *op. cit.*, hlm. 4-5.

⁵⁵ Poni Purnomo, wawancara.

⁵⁶ Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Brawijaya (IKABRA), *op. cit.*, hlm. 5-6.

- b) Blitar Selatan pernah menyerap paham komunis sebagai akibat dari sisa-sisa pemberontakan PKI Madiun di mana YON Brantas Brigade 29 yang berunsurkan komunis ada yang menyusup ke Blitar Selatan. Pengaruh PKI tersebut tidak lenyap di daerah-daerah ini bahkan masih hidup terus, hal ini terbukti pada Pemilihan Umum 1955, PKI memborong suara 85 % dari jumlah pemilih di daerah tersebut.
- c) Rakyat Blitar Selatan demikian miskin dan terbelakangnya sehingga mudah dipengaruhi PKI. Di samping itu PKI selalu berusaha menyebut usaha-usaha lurah untuk memperbaiki nasib rakyat, sehingga PKI-lah yang mendapat nilai baik dan pada waktu-waktu pemilihan lurah, orang-orang PKI-lah yang terpilih menjadi lurah tersebut. Daerah Blitar Selatan yang terlupakan itu pada hakekatnya merupakan persembunyian anasir-anasir kriminal terutama bromocorah, sehingga keamanan sering terganggu. Pemerintah daerah setempat waktu itu belum berhasil mengamankan gangguan tersebut, namun justru PKI-lah yang mampu mengatasinya karena besar kemungkinan yang menjalankan teror di daerah-daerah tersebut adalah PKI sendiri. Apalagi didukung dengan pandangan hidup rakyat yang terkenal dengan "*pokok slamet*" juga ikut membantu berhasilnya PKI di Blitar Selatan. Atas dasar itulah maka rakyat Blitar Selatan hingga Operasi Trisula berlansung masih melindungi PKI.

Memasuki tahun 1966, orang-orang yang dulu pernah membunuh PKI tahun 1965 baik di Kediri dan Rejotangan-Tulungagung beserta para kyai, diculiki

oleh pasukan-pasukan PKI. Waktu itu, PKI benar-benar terlatih dan sudah mempunyai kader-kader muda yang berasal dari masyarakat sekitar. Karena lamakelamaan PKI membikin resah, maka pemerintahan Orde Baru (Soeharto secara *de facto*, dan secara *de Jure* masih Soekarno) menganggap bahwa Blitar Selatan dijadikan basis pimpinan PKI Pusat di Jakarta, yang tujuannya membentuk daerah basis untuk merebut kekuasaan negara.⁵⁷ Berdasarkan anggapan pemerintah yang seperti itu, maka muncullah penyelidikan-penyelidikan oleh ABRI yang diawali tahun 1967.⁵⁸ Dan setelah penyelidikan-penyelidikan dapat dibuktikan kebenarannya, maka kemudian disusul dengan adanya operasi ABRI bersama masyarakat yang anti PKI mencari pemimpin-pemimpin PKI. Operasi dilakukan secara terpinpin dan teratur dengan cara penyusuran hanya di jalan-jalan besar, sehingga waktu itu tidak ada korban. Adapun operasi gabungan tersebut dilakukan antara koramil, polisi, hansip, dan masyarakat untuk mencari pimpinan PKI yang dicurigai.⁵⁹

Selama tahun 1966 sampai awal 1967 masyarakat masih dapat bekerja seperti biasa, sekalipun diselimuti rasa was-was dan ketakutan sebab pada tahun 1967 mulai ada operasi pelacakan atau intel. Dalam Operasi Intelegen, pasukan ABRI yang sangat ditakuti oleh masyarakat adalah pasukan komandan Slamet.

⁵⁷ Dari basis Blitar Selatan, PKI mulai menyusun rencana *Come Back*-nya untuk tetap dapat menyebarkan pengaruhnya ke seluruh Nusantara. Untuk itu dapat kita lihat dalam peta politik PKI yang terlampir dalam riset ini, di lampiran 9.

⁵⁸ Mukadji, wawancara.

⁵⁹ Mulyono, wawancara.

Karena mereka dikenal sadis dan kejam, bahkan setiap jumpa orang selalu dihajar. Dengan demikian, orang laki-laki tidak berani berada di rumah, namun celakanya di ladang pun mereka juga was-was. Akhirnya kalau tahu ada operasi, masyarakat langsung menyingkir dan bersembunyi karena kalau tidak demikian pasti ada korban jiwa dari pihak masyarakat. Meskipun di lain pihak kondisinya sangat dilematis, sebab penculikan-penculikan oleh orang tak dikenal terhadap masyarakat juga berlangsung jika diketahui ada masyarakat yang membantu ABRI dan anti PKI.⁶⁰

Adapun mobilisasi kekuatan gabungan ABRI - Rakyat diantaranya yaitu pembentukan satuan tugas Trisula pada tanggal 20 Mei 1968 oleh Pangdam VIII/Brawijaya. Pada dasarnya adalah pengerahan kekuatan besar-besaran dari unsur ABRI di Jawa Timur ditambah dukungan masyarakat dengan tujuan utama menumpas gerakan bersenjata PKI di Blitar Selatan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sebab operasi Cor-ibat Intelejen yang melibatkan tujuh kompi dari tiga batalyon digelar sejak pertengahan Februari sampai pertengahan Mei 1968 belum sepenuhnya menguasai gerakan bersenjata PKI. Bahkan dari hasil evaluasi operasi tersebut diketahui bahwa kekuatan PKI di Blitar Selatan masih sangat kuat karena tokoh-tokohnya belum berhasil ditangkap.⁶¹

⁶⁰ Mulyono, wawancara.

⁶¹ Wawancara dengan Sogito, selaku anggota Batalyon 521- Kediri (1968) selama operasi Trisula dan mendapat tugas sebagai Tim Intelejen Orde Baru, pada hari Senin, tanggal 17-02-2003, pukul 19.00-20.30 WIB, di rumah informan.; Tentang pelaksanaan Operasi Trisula (versi ABRI) secara terperinci dijelaskan dalam buku Laporan Semdam VIII Brawijaya, *Operasi Trisula Kodam*

Namun, ada beberapa kelemahan fatal dari gerakan bersenjata PKI jika hendak melawan ABRI, dan itulah yang menjadikan pihak ABRI semakin percaya diri untuk berhasil merebut Blitar Selatan dari pengaruh komunis. Kelemahan-kelemahan pihak PKI terletak pada disiplin partainya, persiapan-persiapan yang belum matang, nafsu membalas dendam kepada ABRI (TNI-AD khususnya) terlalu tergesa-gesa, sedangkan mereka belum siap untuk menghadapi perang terbuka, dan juga terputusnya hubungan PKI dengan dunia luar. Karena itu, tidak dapat menimbun perlengkapan-perengkapan untuk menghadapi perang yang lebih lama. Mereka hanya menggantungkan nasibnya kepada *supply* bahan pangan dan uang dari orang cina komunis dalam negeri dan simpatisannya. Sedangkan peralatan senjata hanya berharap dari cara perampasan dan dari bantuan oknum-oknum ABRI yang dipengaruhinya.⁶²

VIII/ Brawidjaja, (Surabaya: Semdam VIII Brawidjaja dibantu IKIP Malang Pusat Jajasan Taman Tjandrawilwatika, 1969).

⁶² Semdam VIII Brawijaja, *ibid.*, hlm. 273.

BAB V

KESIMPULAN